



Analisis Penerapan Tahapan Manajemen Proyek dalam Pengelolaan Proyek Teras Cihampelas Kota Bandung

Regita Ayu Agustin¹, Fisca Putri Rahdiana², Najwa Mayang Dayatri³, Muhammad Azka Rozan⁴, Shidqi Abdillah⁵, Yayan Nuryanto⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Pemerintahan, Univeristas Padjadjaran

[1regita23001@mail.unpad.ac.id](mailto:regita23001@mail.unpad.ac.id) , [2fisca23001@mail.unpad.ac.id](mailto:fisca23001@mail.unpad.ac.id) , [3najwa23032@mail.unpad.ac.id](mailto:najwa23032@mail.unpad.ac.id) , [4azka230016@mail.unpad.ac.id](mailto:azka230016@mail.unpad.ac.id) ,
[5shidqi23001@mail.unpad.ac.id](mailto:shidqi23001@mail.unpad.ac.id) , [6yayan.nuryanto@unpad.ac.id](mailto:yayan.nuryanto@unpad.ac.id)

Abstrak

Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.

Kata Kunci: Teras Cihampelas, Manajemen Proyek, Pedagang kaki lima (PKL)

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur publik merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia terus berupaya memperkuat penataan ruang kota melalui pembangunan sarana publik yang representatif dan ramah pejalan kaki. Salah satu proyek strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung adalah pembangunan *Teras Cihampelas*, sebuah kawasan *skywalk* yang diharapkan dapat memperbaiki sirkulasi pejalan kaki, menata pedagang kaki lima (PKL), serta meningkatkan daya tarik wisata perkotaan. Namun, sejak peresmiannya, pembangunan ini memunculkan sejumlah respon beragam terkait efektivitas, pemanfaatan, serta kesesuaian proses pembangunan dengan tujuan awal yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam konteks studi manajemen proyek, evaluasi terhadap suatu proyek tidak hanya dilakukan berdasarkan hasil fisik, tetapi juga melalui analisis menyeluruh terhadap siklus hidup proyek. (Riesna et al., 2023) menyatakan bahwa keberhasilan proyek dapat diukur melalui lima tahapan utama, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan. Setiap tahapan berfungsi memastikan bahwa proyek berjalan secara sistematis, efisien, serta mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan teori manajemen proyek menjadi penting untuk mengetahui apakah penyelenggaraan Teras Cihampelas telah mengikuti standar dan prinsip pengelolaan proyek yang ideal.

Jurnal ini disusun untuk menilai kesesuaian proses pembangunan Teras Cihampelas sejak tahap perencanaan hingga penyelesaiannya dengan lima aspek manajemen proyek menurut (Riesna et al. 2023). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah hasil pembangunan tersebut selaras dengan tujuan awal yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung, baik dari sisi manfaat bagi pejalan kaki, penataan PKL, maupun keberlanjutan pengelolaan ruang publik. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian manajemen proyek sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur pada masa mendatang..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek Teras Cihampelas. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menangkap pengalaman, pandangan, dan dinamika sosial yang muncul di lapangan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu anggota Satpol PP yang bertugas di lokasi dan pedagang PKL yang terdampak. Wawancara semi-struktural memberi panduan pertanyaan sekaligus ruang bagi informan untuk bercerita tentang pengalaman dan persepsi mereka. Semua wawancara dicatat dan ditranskrip untuk keperluan analisis, dengan tetap memperhatikan persetujuan dan anonimitas informan.

Sebagai pelengkap, studi literatur dilakukan dengan menelaah artikel jurnal, tesis, prosiding, dokumen perencanaan, dan laporan media yang relevan. Sumber-sumber ini dipakai untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori manajemen proyek serta praktik serupa pada proyek infrastruktur perkotaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat dinamika pelaksanaan proyek ini, diperlukan landasan teoritis yang dapat menggambarkan alur pengelolaan proyek secara sistematis. Oleh karena itu, peneliti mengacu pada teori lima kelompok proses manajemen proyek menurut PMI. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana setiap tahapnmulai dari inisiasi hingga penutupan telah diterapkan di lapangan. Proses pada manajemen proyek merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk mengelola proyek dari awal hingga akhir hingga berhasil (Riesna et al., 2023).

Inisiasi

Proyek Teras Cihampelas Bandung dimulai ketika Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi adanya permasalahan tata ruang dan mobilitas di kawasan Cihampelas, yang merupakan salah satu pusat wisata belanja paling padat di Kota Bandung. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di sepanjang trotoar sering kali menimbulkan penyempitan ruang pedestrian, peningkatan potensi kemacetan, dan rendahnya kenyamanan wisatawan. Melalui kajian awal yang dilakukan oleh pemerintah kota bersama tenaga ahli, muncul kebutuhan untuk menghadirkan solusi yang mampu menata PKL tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi mereka, sekaligus meningkatkan kualitas ruang publik. Dari sinilah gagasan pembangunan jalur pedestrian layang yang kemudian dikenal sebagai *Teras Cihampelas* mulai dirumuskan.

Pada tahap inisiasi ini, pemerintah menetapkan tujuan proyek secara jelas, yaitu menciptakan ruang publik vertikal yang terintegrasi, memberikan lokasi usaha yang lebih tertata bagi PKL, mengurangi beban kepadatan di jalur pedestrian bawah, serta mempercantik wajah kawasan wisata Cihampelas. Penetapan tujuan ini dituangkan ke dalam dokumen awal yang berfungsi sebagai *project charter*, yang menjadi dasar komitmen dan arah pengembangan proyek ke

fase berikutnya. Dalam dokumen inisiasi tersebut, ruang lingkup proyek ditentukan meliputi pembangunan jalur pedestrian layang sepanjang kurang lebih 450 meter.

Proses inisiasi juga mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam proyek. Pemerintah Kota Bandung menjadi pemrakarsa utama, didukung oleh perangkat daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Dinas Koperasi dan UMKM yang menangani penataan PKL. Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (Pusjatan) turut dilibatkan dalam proses perencanaan teknis dan kajian struktur. Sementara itu, PKL di sepanjang Cihampelas menjadi pemangku kepentingan yang terdampak langsung, sehingga diperlukan pendekatan sosial untuk memastikan bahwa relokasi ke teras layang dapat diterima dan mendukung peningkatan pendapatan mereka. Warga Kota Bandung, wisatawan, serta pelaku usaha sekitar juga termasuk dalam stakeholder karena mereka menjadi pengguna akhir ruang publik tersebut.

Perencanaan

Perencanaan pembangunan Teras Cihampelas pada awalnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan Pemerintah Kota Bandung untuk menata ulang kawasan Cihampelas yang padat, semrawut, serta dipenuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengganggu sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Dalam tahap perencanaan awal, pemerintah menetapkan tujuan utama berupa peningkatan kualitas ruang publik, efisiensi arus lalu lintas, serta penyediaan ruang yang lebih tertata bagi PKL. Beberapa studi menyebutkan bahwa konsep *skywalk* dipilih sebagai solusi fisik yang memisahkan arus pejalan kaki dari jalan raya sekaligus menjadi media relokasi PKL ke ruang khusus yang dirancang di atas koridor jalan. Dengan demikian, rancangan proyek sudah memuat konsep zonasi, kapasitas kios, dan desain struktur yang bertujuan mendukung fungsi pedestrianisasi dan revitalisasi kawasan.

Meski memiliki tujuan yang jelas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dokumen perencanaan proyek masih memiliki kekurangan signifikan, terutama terkait studi kelayakan. Kajian evaluatif dan tesis akademik mencatat tidak ditemukannya *feasibility study* komprehensif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan sebelum proyek mulai dibangun. Keterbatasan dalam perencanaan ini juga mencakup minimnya pelibatan pemangku kepentingan seperti PKL dan warga sekitar dalam tahap perumusan desain dan kebijakan. Hal tersebut berpengaruh pada munculnya sejumlah masalah setelah proyek selesai, seperti rendahnya okupansi kios, kurangnya fungsi ekonomi, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan pengguna dengan fasilitas yang disediakan. Selain itu, perencanaan fasilitas pendukung seperti area parkir, aksesibilitas penyandang disabilitas, pengelolaan sampah, serta keamanan dinilai belum matang dan menimbulkan tantangan dalam operasional.

Dalam aspek teknis, beberapa dokumen akademik mencatat bahwa perencanaan desain fisik seperti pembagian zona, jumlah kios, jalur pedestrian, dan struktur bangunan sebenarnya dirancang dengan jelas. Namun, kesenjangan antara perencanaan fisik dan perencanaan operasional jangka panjang masih terlihat. Evaluasi pasca-pembangunan menunjukkan bahwa strategi pengelolaan, pemeliharaan, hingga model bisnis tidak dibahas secara memadai pada tahap perencanaan awal. Oleh karena itu, literatur yang relevan menekankan pentingnya penyusunan studi kelayakan lengkap, peningkatan partisipasi publik, perencanaan fasilitas pendukung, serta strategi keberlanjutan operasional sebelum proyek serupa dilaksanakan di masa mendatang.

Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen proyek merupakan tahap kunci dalam proses manajemen proyek yang berfokus pada implementasi rencana proyek secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori proses manajemen proyek oleh Riesna et al. (2023), pelaksanaan meliputi koordinasi sumber daya manusia dan material, serta kerja sama antar pemangku kepentingan agar semua aktivitas berjalan sesuai jadwal dan rencana yang ditetapkan. Tahap ini juga menuntut keterlibatan aktif pemangku kepentingan, komunikasi yang baik, dan pemantauan berkelanjutan agar hasil proyek sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks proyek Teras Cihampelas di Bandung, pelaksanaan proyek ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan daya tarik kawasan sebagai ruang publik dan destinasi wisata yang nyaman. Pelaksanaan diwujudkan melalui pengerjaan fisik yang melibatkan penataan ulang kios pedagang dan penyediaan fasilitas yang mendukung. Proses ini juga mencakup sosialisasi dan koordinasi dengan para pedagang agar mereka dapat menempati lokasi sesuai penataan baru dan melaksanakan aktivitas dagang secara terorganisir. Para pedagang dan Satpol PP berperan aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan dengan mengikuti arahan dan pengaturan yang telah disampaikan sejak tahap sosialisasi.

Pelaksanaan manajemen proyek selama masa pembangunan Teras Cihampelas sendiri dimulai pada tanggal 21 September 2015 hingga 29 Desember 2016. Proyek ini melibatkan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (yang kemudian dialihkan ke Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta forum komunikasi pedagang sebagai penghubung langsung dengan pemerintah. Sosialisasi intensif dilakukan untuk mendidik pedagang mengenai perubahan regulasi dan penataan lokasi berdagang, memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Meski pembangunan fisik seperti skywalk dan penataan fasilitas dasar berjalan, proyek ini menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian dengan tata ruang, keterbatasan sumber daya, dan dampak sosial berupa penurunan pendapatan pedagang. Penundaan dan revitalisasi menjadi bagian dari proses adaptasi proyek agar hasilnya sesuai harapan.

Hasil wawancara dan informasi resmi menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dasar sudah tersedia dan renovasi dilakukan, dampak sosial ekonomi terhadap pedagang dan pengunjung belum optimal dengan pengunjung ramai hanya di akhir pekan. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya melalui revitalisasi lanjutan untuk menghidupkan kembali fungsi Teras Cihampelas sebagai ruang publik dan ikon wisata yang representatif. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan proyek mengandung unsur adaptasi yang dinamis dan keterlibatan semua pemangku kepentingan agar proyek dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan dan proses pembangunan Teras Cihampelas mencerminkan prinsip manajemen proyek yang meliputi perencanaan, koordinasi sumber daya, implementasi fisik, dan adaptasi terhadap kendala di lapangan. Pelaksanaan yang sistematis serta komunikasi dan keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting sebagai fondasi sebelum pengawasan dan evaluasi yang lebih mendalam dilakukan pada tahap berikutnya.

Pengawasan

Teras Cihampelas di Kota Bandung merupakan proyek revitalisasi ruang publik berupa *skywalk* sepanjang 700 meter dan menjadi yang pertama di Indonesia. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2017 dengan biaya awal sekitar Rp 48 miliar, dan kemudian ditambah anggaran Rp 23 miliar pada 2018 untuk kelanjutan tahap kedua. Pengawasan atau *monitoring and controlling* adalah proses pemantauan kinerja proyek secara berkala agar semua tahap berjalan sesuai rencana.

Menurut PMBOK, pengawasan mencakup pelaporan kinerja, pengukuran capaian aktual, dan pelacakan kemajuan terhadap rencana manajemen proyek. Hasil monitoring ini digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan, misalnya keterlambatan jadwal atau pembengkakan biaya dan menentukan tindakan korektif yang diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan proyek, mulai dari pemantauan kinerja, seperti *schedule*, biaya, dan kualitas. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemajuan aktual proyek terhadap baseline jadwal dan anggaran. Dengan memantau secara rutin, tim proyek dapat segera mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Kemudian, pengawasan pelaksanaan proyek Teras Cihampelas di Kota Bandung juga meliputi identifikasi penyimpangan dan tindakan korektif, pengendalian perubahan proyek, manajemen risiko, dan laporan dan komunikasi.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh beberapa lembaga atau instansi pemerintah. Seperti halnya Satpol PP yang turut melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan proyek. Setelah mewawancara salah satu anggota Satpol PP yang bertugas di Teras Cihampelas, diketahui bahwa Satpol PP ikut berkontribusi dalam pengawasan proyek Teras Cihampelas ini. Satpol PP melakukan pengawasan keamanan untuk menghindari adanya pungli dari ormas ataupun preman di sekitar lokasi proyek pembangunan. Selain itu, Pak Fadhillah juga menyebutkan adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk melakukan pengawasan keamanan, seperti dengan Polisi, TNI, dan Linmas.

Secara garis besar, pengawasan pelaksanaan proyek Teras Cihampelas seharusnya dapat menjaga agar penyimpangan terhadap rencana awal terdeteksi dini. Namun, dari data kasus masih terlihat adanya kelemahan pengawasan, seperti pengerjaan yang molor dan fasilitas yang tidak berfungsi secara optimal. Proyek dengan pengawasan yang lemah umumnya mengalami masalah seperti kurangnya data yang akurat, sulit melacak kemajuan, dan rendahnya visibilitas proyek.

Pengawasan juga tetap dilakukan pasca-pelaksanaan, seperti adanya pemeliharaan dan keamanan. Pemkot Bandung memperketat pengamanan Teras Cihampelas dengan patroli Satpol PP 24 jam untuk mencegah vandalisme dan perusakan fasilitas umum. Fasilitas yang rusak akibat vandalisme langsung diperbaiki sebagai respons korektif pasca-pembangunan. Upaya ini penting agar proyek yang telah menelan anggaran besar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan melakukan pengawasan pasca-konstruksi yang sistematis, Kota Bandung dapat memastikan bahwa proyek Teras Cihampelas memberikan dampak positif yang maksimal. Pentingnya monitoring pasca proyek untuk memastikan semua tujuan telah tercapai. Singkatnya, pengawasan yang konsisten mulai dari pelaksanaan hingga pasca-konstruksi adalah kunci agar proyek besar seperti Teras Cihampelas tidak berakhir sia-sia dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penutupan

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, penutupan penelitian ini merangkum beberapa rekomendasi strategis yang perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proyek Teras Cihampelas. Rekomendasi pertama adalah pelaksanaan studi kelayakan yang komprehensif sebelum pengerjaan lapangan. Studi kelayakan tersebut harus mencakup analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendalam sehingga desain dan skema operasional dapat disesuaikan dengan daya dukung ruang dan kebutuhan pengguna. Kajian awal yang matang akan meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara tujuan perencanaan dan hasil di lapangan serta membantu perumusan indikator kinerja yang jelas untuk tahap pelaksanaan dan pasca-konstruksi.

Rekomendasi kedua menekankan pentingnya peningkatan partisipasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan sejak fase perencanaan. Keterlibatan pedagang kaki lima, warga sekitar, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha lokal perlu diprogramkan secara sistematis melalui mekanisme konsultasi, forum musyawarah, dan uji penerimaan desain. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan relokasi dan penataan, tetapi juga memungkinkan penyesuaian teknis yang responsif terhadap kebutuhan riil pengguna sehingga mengurangi potensi resistensi dan relokasi yang tidak berkelanjutan.

Selanjutnya, perlu ditekankan penguatan fasilitas pendukung dan aspek aksesibilitas sebagai bagian integral dari desain dan pengelolaan Teras Cihampelas. Selain penyediaan infrastruktur dasar seperti jalur pejalan kaki yang aman, toilet umum, dan sistem pengelolaan sampah, perhatian khusus harus diberikan pada akses bagi penyandang disabilitas dan mekanisme penataan ruang dagang yang realistik. Upaya perbaikan fasilitas yang telah dilakukan perlu diikuti dengan rencana operasional jangka panjang yang menjamin pemeliharaan, perbaikan, serta ketersediaan layanan pendukung agar fungsi ruang publik dapat terwujud secara optimal.

Akhirnya, pengawasan dan pemeliharaan pasca-konstruksi harus dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi antarinstansi. Mekanisme monitoring berkala, pelaporan kinerja yang transparan, serta prosedur tindakan korektif yang cepat diperlukan untuk menjaga kualitas fasilitas dan mengantisipasi degradasi fungsi ruang. Peran aparat pengamanan dan pengelola lapangan perlu dipadukan dengan kebijakan pemeliharaan yang berkelanjutan sehingga investasi publik tidak hanya berujung pada penyelesaian fisik, tetapi juga pada pencapaian manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Teras Cihampelas merupakan proyek skywalk perkotaan yang dirancang melalui tahapan manajemen proyek konvensional (inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penutupan). Inisiasi proyek telah menetapkan tujuan meningkatkan ruang publik vertikal dan menata PKL, serta mendeklarasikan anggaran awal yang jelas. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Tahap perencanaan proyek kurang didukung studi kelayakan menyeluruh sehingga aspek operasional seperti tata kelola PKL, fasilitas penunjang, dan kelestarian lingkungan kurang dirumuskan dengan matang. Akibatnya, meski jalur pejalan kaki layang sepanjang 450 meter tersebut telah dibangun dan diresmikan pada 2017, tidak tercapai tujuan awalnya secara penuh. Pedagang yang sempat direlokasi justru kembali ke trotoar, mengakibatkan kemacetan berlanjut, sedangkan jumlah pengunjung di teras atas tidak signifikan.

Pelaksanaan dan pengawasan proyek juga menghadapi kendala: walaupun pembangunan fisik selesai, termasuk tahap kedua dengan tambahan biaya pembangunan yang besar, pengendalian perubahan dan pemantauan hasil yang berkelanjutan terbukti belum optimal. Pola operasi Teras Cihampelas di lapangan menunjukkan fungsionalitas yang belum selaras dengan sasaran perencanaannya. Dalam konteks manajemen proyek, kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik, tetapi dari pencapaian manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, studi ini menyimpulkan bahwa implementasi Teras Cihampelas telah mengikuti kerangka kerja manajemen proyek secara formal, namun hambatan dalam perencanaan stakeholder dan dukungan operasional melemahkan hasilnya. Evaluasi ini menyoroti perlunya perbaikan pada tahap awal proyek publik berikutnya agar tujuan infrastruktur baik untuk pejalan kaki, PKL, maupun tata ruang kota dapat terpenuhi. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi

pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola proyek infrastruktur perkotaan mendatang, dengan menitikberatkan pada keterlibatan publik dan persiapan operasional jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, A. (2018). *Evaluasi Skywalk Teras Cihampelas* (Tesis, Institut Teknologi Bandung). Institut Teknologi Bandung.
- Astutik, Y. (2024). *Evaluasi Placemaking pada Teras Cihampelas*. Prosiding Seminar Nasional. Bandung Bergerak. (2025, April 24). Lupakan Teras Cihampelas. *Bandung Bergerak*.
- Detik.com. (2025, July 3). Nasib Teras Cihampelas, Bangunan Rp 74 Miliar yang Mangkrak. *Detik*.
- Ghazi, M. N. (2025). *Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Pembinaan PKL di Skywalk Teras Cihampelas Kota Bandung*. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*.
- Kompas Bandung. (2025, May 4). Pemkot Bandung Mulai Kaji Revitalisasi Teras Cihampelas. *Kompas*.
- Pamungkas, T. B., & Agustina, R. (2022). *Identifikasi Kualitas Ruang Publik Skywalk Cihampelas*. Prosiding Seminar Nasional FTSP ITENAS.
- Permana, A. (2025). *Perspektif Teras Cihampelas Bandung*. *The Sunan Journal*.
- Nirmala, M. R., & Kurniawan, B. (2018). *Pengaruh Teras Cihampelas terhadap koridor Jalan Cihampelas Bandung*. Jurnal IDEALOG, Telkom University.